

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah desa disebut sebagai lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan di Indonesia untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan di masyarakat. Dalam proses menjalankannya, pemerintahan desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pembangunan secara merata di lingkup pedesaan sehingga pemerintah pusat dapat menciptakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara merata di setiap daerah.

Pemerintah desa merupakan organisasi secara langsung menangani segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat, desa memiliki peran yang sangat strategis untuk menjalankan tugas khususnya di bidang pelayanan umum terhadap masyarakat. Desa dibentuk dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai tingkat dan kemajuan pembangunan di setiap desa.

Upaya dalam mewujudkan pembangunan secara merata di setiap desa tentu diperlukannya dana desa sebagai pendukung dalam proses pembangunan desa itu sendiri, dimana pengertian dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN melalui APBD kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di setiap desa.

Aliran pendapatan dana desa secara keseluruhan membiayai semua instansi yang bertanggung jawab atas desa, termasuk dalam penyusunan administrasi, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Maka, penerimaan APBN digunakan untuk membiayai hak pemerintah desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi landasan hukum diakuinya desa atau kelurahan sebagai daerah otonom,

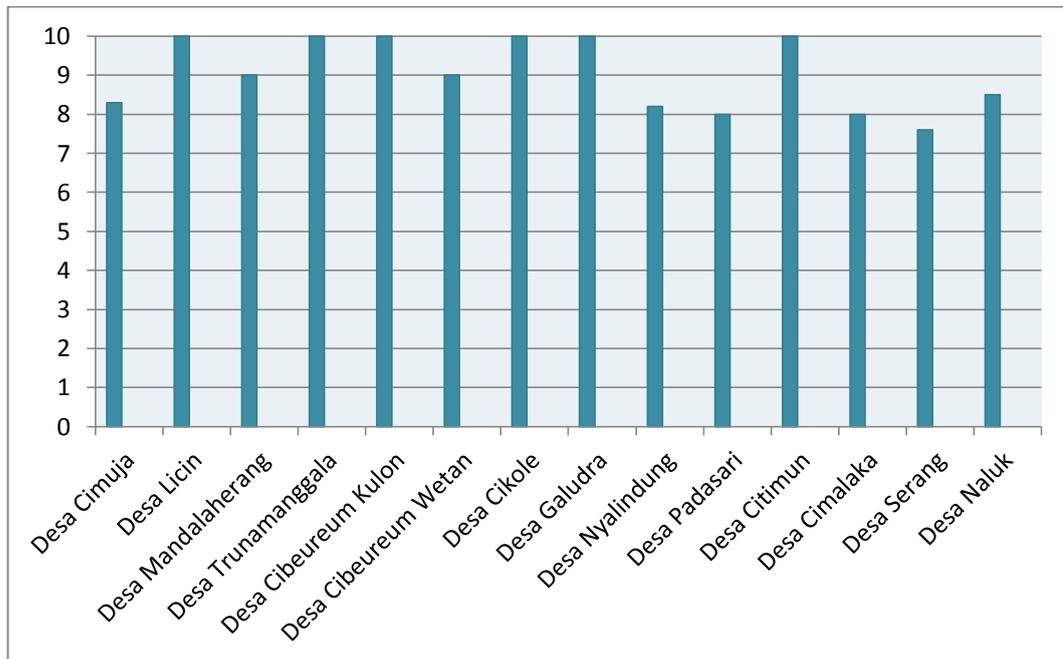
maka dengan ini desa diseluruh negara Indonesia menerima dana desa kurang lebih satu miliar per tahunnya (Laoli, 2019).

Pemerataan anggaran yang berkisar satu milyar ini disesuaikan dengan kemampuan administrasi pemerintah desa yang sangat fleksibel dengan aturan desentralisasi fiskal, yang mengatur besaran anggaran desa sesuai dengan pengeluaran kebutuhan dan pengelolaannya. Sehingga dana desa bertujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepentingan umum di desa, mengatasi kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat desa, menghilangkan perbedaan pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain dengan tujuan untuk memperkuat masyarakat desa.

Pemerintah desa diberikan wewenang atas kebijakan otonomi daerah, sebagaimana pemerintahan desa dalam pemberian layanan kepada masyarakat sesuai kapasitas desa atau kelurahan tentu pemerintah desa diberi dana desa oleh pemerintah untuk mensejahterakan serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pemerintah desa diberikan kewenangan dalam menjalankan sistem pemerintahannya sesuai dengan undang-undangan, hal ini dimaksudkan agar terciptanya kesejahteraan pada pedesaan. Kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai keadaan dimana terpenuhinya segala jenis kebutuhan hidup, yang paling utama kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan sampai kesehatan.

Melihat undang-undang yang ditetapkan bahwa besaran dana desa pertahunnya kurang lebih satu miliar rupiah. Hal ini tentu dapat dijadikan alat penunjang dalam pembangunan desa secara optimal dan tepat sasaran, sehingga hasil dari pembangunan desa yang baik akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut sesuai dengan tabel APBDes Desa di Kecamatan Cimalaka tahun anggaran 2023, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:



Grafik 1.1 Dana Desa di Kecamatan Cimalaka

Sumber: Info Grafis APBDes Desa Tahun Anggaran (2023)

Berdasarkan grafik 1.1 tentang dana desa di Kecamatan Cimalaka, terdapat banyak variasi jumlah dana desa yang diterima setiap desanya. Dana desa tertinggi diperoleh oleh Desa Licin, Desa Trunamanggala, Desa Cibereum Kulon, Desa Cikole, Desa Galudra dan Desa Citimun dengan perolehan mencapai satu milyar rupiah. Adapun dana desa terendah diperoleh oleh Desa Cimuja, Desa Nyalindung, Desa Padasari, Desa Cimalaka dan Desa Serang dengan perolehan mencapai delapan ratus juta rupiah.

Dana desa yang diarahkan pemerintah ke setiap desa sejatinya tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap desa itu sendiri, khususnya di wilayah Kecamatan Cimalaka. Hal ini tentu harus diimbangi juga dengan penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan perundang-undangan secara efektif, ekonomis, efisien, transparan dan tanggung jawab demi terwujudnya tujuan dari adanya dana desa itu sendiri. Dana desa yang sebesar itu, sangat mungkin terjadi dugaan-dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya hal ini

didorong dengan keadaan kepala desa dan staff desa yang dinilai masih lemah dalam pengelolaan dana desa itu sendiri, juga kondisi masyarakat yang belum kritis menjadikan bentuk pengawasan masyarakat terhadap dana desa belum berjalan secara maksimal. Faktor lainnya dapat dipicu juga dengan adanya intervensi-intervensi oleh atasan dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai perencanaan, kemudian faktor keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan yang berpotensi terhadap oknum aparat pemerintah desa sehingga tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa.

Mengenai latar belakang diatas, melihat jumlah dana desa yang diterima setiap desa cukup besar jumlahnya sehingga sangat penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini lebih jauh. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran mengenai pengelolaan dana desa secara langsung dari desa desa yang berada di wilayah Kecamatan Cimalaka. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini diangkat dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” (Penelitian di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan pengamatan yang telah dilakukan, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Dana desa pertahunnya berkisar satu miliar rupiah, sehingga rentan akan dugaan penyimpangan anggaran oleh pemerintah desa.
2. Kondisi keadaan kepala desa dan staff pemerintah desa yang dinilai masih lemah dalam pengelolaan dana desa.
3. Kurang maksimalnya pengawasan dan daya kritis yang dilakukan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka masalah yang telah peneliti rumuskan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Kecamatan Cimalaka?
2. Bagaimana kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimalaka?
3. Bagaimana pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimalaka?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bantuan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimalaka. Adapun tujuan khususnya diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Kecamatan Cimalaka.
2. Untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimalaka.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimalaka.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan adanya penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil baik secara akademis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Akademis (Teoritis)

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memperbanyak ilmu pengetahuan dibidang ilmu-ilmu sosial khususnya pada sosiologi pembangunan dalam rangka mendukung dana desa untuk kesejahteraan masyarakat ditingkat pedesaan. Adapun manfaat akademisnya dapat memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi tentang dana desa dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Manfaat lainnya dari penelitian ini dilihat dari segi sosiologi pembangunan yaitu bahwa dana desa sejatinya sangat membantu dalam proses pembangunan masyarakat ditingkat pedesaan melalui pemerintah desa baik dari segi aspek penyelenggaraan pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa, maka pemerintah desa mampu melakukan

pembangunan pembangunan di tataran desa dengan baik dan terarah melalui program yang telah disepakati bersama melalui musyawarah desa. Dengan adanya pembangunan pada tingkat desa, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya secara merata.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih pemikiran guna melahirkan kebijakan baru bagi pemerintah desa serta adanya peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Cimalaka secara praktis, selain itu memberikan pemahaman dan usulan kepada pemerintah desa akan program program baru kedepan untuk mengefektifkan pengelolaan dana desa menjadi tepat sasaran.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui dana desa, diharapkan desa mampu menyelenggarakan kewenangannya dengan baik agar terciptanya pembangunan dan kesejahteraan secara merata. Pemerintah desa mempunyai kekuasaan untuk menjalankan sistem pemerintahannya, melaksanakan pembangunan, melakukan kegiatan pembinaan masyarakat desa, dan memperkuat lingkungan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat, dan adat istiadat desa. Dana desa yang diarahkan ke desa harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap desa, khususnya desa desa di Kecamatan Cimalaka.

Pemerintah pusat memberikan dana desa melalui APBN mencapai Satu Miliar pertahunnya. Dengan dana desa sebesar itu, sangat mungkin terjadi dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya hal ini didorong dengan kondisi keadaan staff desa yang dinilai masih lemah juga posisi masyarakat desa yang masih belum kritis dalam pengelolaan APBDesa sehingga membuat bentuk kontrol masyarakat desa belum bisa maksimal.

Anthony Giddens merupakan salah satu tokoh sosiologi yang mencetuskan teori strukturasi, teori ini menggagas agen dan struktur. Agen

memiliki beberapa bentuk kesadaran, agen yang meliputi motif tidak sadar, kesadaran dikursif dan kesadaran praktis. Selain itu Anthony Giddens juga memaparkan definisi struktur. Struktur dibagi dalam tiga bagian, yaitu: 1) Signifikasi, 2) Dominasi, dan 3) Legitimasi.

Hubungan antara agen dan struktur dapat saling menciptakan keterulangan dalam lintas ruang dan waktu untuk menjadi praktik sosial. Dalam teori strukturasi Anthony Giddens, antara agen dan strukturasi keduanya harus saling berhubungan, yang mana ketika agen melakukan sesuatu maka struktur mengatur berjalannya kondisi masyarakat dengan pihak-pihak agen. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih jauh untuk mendapatkan gambaran-gambaran terkait pengelolaan dana desa untuk mengetahui secara langsung dan seberapa besar pengaruh positifnya dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimalaka. Maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema gambar kerangka dibawah ini:



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Modifikasi Peneliti

G. Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata “*hipo*” yang artinya lemah dan “*tesis*” yang memiliki arti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya. Proses pembentukan hipotesis merupakan sebuah proses penalaran, yang melalui tahap-tahap tertentu. Hal demikian juga terjadi dalam pembuatan hipotesis ilmiah, yang dilakukan dengan sadar, teliti, dan terarah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sebuah hipotesis merupakan satu tipe proposisi yang langsung dapat diuji. Menurut Nasehudin (2015:88) hipotesis adalah asumsi

mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih, hipotesis adalah jawaban sementara untuk masalah penelitian yang telah ditentukan. Hipotesis biasanya berbentuk pernyataan dan menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

Menurut Sugiyono (2012:64) hipotesis penelitian adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen sehingga hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut teori.

Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian kuantitatif, kegunaan lain dari hipotesis penelitian yaitu memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data, sebagai wadah untuk menguji teori, mendorong munculnya teori, menerangkan fenomena sosial, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, dan memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : “Diduga pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Cimalaka”.